

**PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUMANGGI
KECAMATAN BATANG ALAI UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



O L E H

MONAWARAH

NPM : 2022306

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MONAWARAH

NPM : 2022306

Program Studi : S1 Administarsi Publik

Judul Skripsi : **"PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUMANGGI
KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

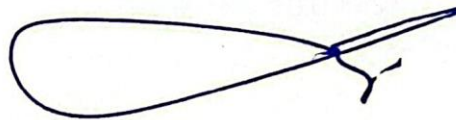
Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Dr. Irza Setiawan, S.Sos., M.AP
NUPTK. 9456765666137023

Pembimbing 2



Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.A.P.
NUPTK. 4142764665137003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dalam bentuk yang sederhana. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Adapun tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dengan judul: **“PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUMANGGI KECAMATAN BATANG ALAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan berupa sumbangan pemikiran dan data dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan proposal ini di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Amuntai, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Teori Pengelolaan Sampah (3R: <i>Reduce, Reuse, Recycle</i>).....	11
C. Tinjauan Teoritis.....	14
D. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah	23
E. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Tipe Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data	32

E. Desain Operasional Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
H. Uji Kredibilitas Data	39
DAFTAR PUSTAKA.....	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Data Informan	32
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	
Kerangka Berpikir	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Di Indonesia, permasalahan sampah masih menjadi persoalan yang kompleks, karena selain volume sampah yang terus meningkat, kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah juga masih relatif rendah. Sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, konflik sosial, serta kebutuhan lahan dan biaya pengelolaan yang besar.

Secara normatif, pengelolaan sampah telah diatur dalam berbagai regulasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020, sampah merupakan sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat, baik berupa sampah rumah tangga maupun sejenisnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan oleh pemerintah. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui penyediaan sarana, prasarana, serta inovasi dalam tata kelola pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah penyediaan fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun sarana pendukung lainnya. Fasilitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi empiris di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 juga mengatur secara rinci kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, melakukan pengangkutan sampah, serta membina partisipasi masyarakat. Namun demikian, realitas di Desa Sumanggi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang bersifat struktural maupun kultural.

Fenomena pertama yang ditemukan adalah masih adanya kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan melakukan pembakaran sampah secara langsung. Perilaku ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang melarang pembuangan sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, termasuk ke sungai, serta melarang pengelolaan sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, kebiasaan tersebut tidak hanya mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Fenomena kedua adalah tidak berjalannya sistem pengangkutan sampah secara rutin, meskipun sarana dan prasarana pendukung telah tersedia. Berdasarkan hasil pengamatan, pemerintah telah menyediakan fasilitas seperti kendaraan pengangkut (viar) dan bak sampah, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya sistem operasional yang berjalan secara konsisten. Kondisi ini bertentangan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA serta wajib menyediakan dan memelihara sarana pengelolaan sampah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, hal ini menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketidakberfungsian sistem pengangkutan

ini dapat dikategorikan sebagai bentuk lemahnya implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Fenomena ketiga adalah tidak adanya petugas khusus yang menangani pengangkutan sampah di Desa Sumanggi. Ketiadaan sumber daya manusia yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah menyebabkan pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, dalam Perda Nomor 10 Tahun 2013 telah ditegaskan bahwa pemerintah daerah melalui perangkatnya memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan operasional pengelolaan sampah, termasuk dalam aspek pengangkutan dan pelayanan kebersihan. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menekankan pentingnya keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan sampah. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, seperti membuang sampah sembarangan atau membakarnya.

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh kondisi yang lebih luas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana persoalan sampah masih menjadi tantangan serius. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program seperti Surung Sintak dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya, implementasi di tingkat desa masih menghadapi kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan konsistensi pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan program belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengelolaan sampah apabila tidak didukung oleh sistem pelaksanaan yang memadai dan keterlibatan masyarakat yang aktif. Dengan

demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Sumanggi tidak hanya memerlukan pendekatan struktural melalui penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pendekatan sosial melalui pemberdayaan masyarakat serta penguatan tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks ini, pendekatan *innovative governance* menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan sampah, sehingga diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi yang meliputi aspek perilaku masyarakat, kelembagaan, serta implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pengelolaan sampah dilaksanakan di Desa Sumanggi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pengelolaan Sampah di Desa Sumanggi Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.”

B. Fokus Penelitian

Konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

mengemukakan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui 3 prinsip utama, yaitu:

1. Pengurangan (Reduce)
2. Penggunaan kembali (Reuse)
3. Daur ulang (Recycle).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan semua uraian di atas, maka manfaat yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan tata kelola pemerintahan desa (*innovative governance*). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, khususnya dalam penyediaan layanan pengangkutan, pemanfaatan sarana prasarana, serta penguatan peran kelembagaan desa.

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

c. Bagi Pemerintah Daerah (DLH)

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran, khususnya di wilayah pedesaan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. **Siti Riska Tiara, Reno Affrian, dan Yusran Fahmi (2026)** dalam penelitian berjudul **“Pengelolaan Sampah pada Pasar Tradisional di Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”** yang diterbitkan dalam Jurnal Pelayanan Publik oleh Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan sampah di Pasar Tradisional Desa Pasar Panas, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong berdasarkan fungsi manajemen George R. Terry serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan delapan informan kunci, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan sampah telah berjalan cukup optimal, terutama pada aspek kejelasan tujuan, pembagian tugas, struktur organisasi, koordinasi, kepemimpinan, motivasi, hingga monitoring dan evaluasi. Namun, aspek perencanaan program masih belum optimal karena pengelolaan sampah masih bersifat situasional dan belum memiliki dokumen perencanaan rutin yang formal. Faktor pendukung utama meliputi perencanaan operasional yang terarah dan kedisiplinan kerja petugas lapangan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana kebersihan, kurangnya armada pengangkut, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya

kesadaran pedagang dalam membuang dan memilah sampah. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di pasar tradisional memerlukan penguatan sarana pendukung, sinergi kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

2. **Nur Husni Emilson dkk.** (2023) dalam penelitian yang berjudul **“Kebijakan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi di Desa Tanjung Atap Barat Ogan Ilir”** bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sampah berbasis nilai ekonomi melalui kebijakan desa. Penelitian ini dilakukan oleh Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, sosialisasi, dan pendampingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan regulasi desa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong pengelolaan sampah menjadi sumber ekonomi melalui pemilahan dan pengelolaan rumah tangga. Pembahasan menekankan pentingnya regulasi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan nilai tambah dari sampah. Kesimpulannya, pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan pendekatan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan.

Secara umum, kelima penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam fokus kajian, yaitu pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan peran pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan tersebut. Selain itu, seluruh penelitian menggunakan pendekatan kualitatif atau berbasis pemberdayaan

masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, edukasi, dan dukungan kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Persamaan lainnya terletak pada upaya mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui berbagai strategi seperti pemilahan sampah, pembentukan bank sampah, penyusunan regulasi desa, hingga program berbasis kebijakan daerah.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada masing-masing penelitian. Perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian, di mana beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada aspek edukasi masyarakat, kelembagaan, kebijakan, maupun nilai ekonomi sampah. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda juga menunjukkan variasi karakteristik permasalahan dan pendekatan yang digunakan. Adapun gap penelitian dalam studi ini adalah belum adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji pengelolaan sampah di tingkat desa dengan menyoroti secara langsung permasalahan nyata seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan membakar sampah, tidak berfungsinya sarana yang telah tersedia, serta ketiadaan petugas pengangkutan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi dalam perspektif tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

B. Teori Pengelolaan Sampah (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*)

Teori pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan konsep pengelolaan lingkungan yang menekankan pada upaya pengurangan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, serta pendaurulangan

sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang masih memiliki nilai guna. Menurut Ristya (2020), prinsip 3R merupakan pendekatan yang efektif dalam mengelola sampah rumah tangga karena berfokus pada perubahan perilaku masyarakat sejak dari sumber timbulan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah juga ditekankan pada dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah, yang secara konseptual sejalan dengan prinsip 3R. Oleh karena itu, teori ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Konsep 3R pertama kali berkembang dalam gerakan lingkungan global pada tahun 1970-an yang dipicu oleh meningkatnya kesadaran terhadap krisis lingkungan akibat industrialisasi dan konsumsi massal. Prinsip ini kemudian diperkuat dalam berbagai forum internasional, salah satunya dalam Agenda 21 pada Konferensi Rio Earth Summit tahun 1992 yang menekankan pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, konsep 3R tidak hanya menjadi gerakan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan publik di berbagai negara. Di Indonesia, prinsip 3R mulai diadopsi secara formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun tidak memiliki satu tokoh tunggal sebagai pencetus, konsep ini berkembang dari pemikiran para ahli lingkungan seperti William Rathje dalam studi tentang sampah dan perilaku konsumsi, serta didukung oleh lembaga internasional seperti United Nations Environment

Programme (UNEP). Dengan demikian, teori 3R merupakan hasil perkembangan kolektif dari pemikiran global tentang pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian, teori 3R dapat dioperasionalkan menjadi variabel dan indikator sebagai berikut:

1. *Reduce* (Mengurangi Sampah)

Reduce merupakan upaya untuk mengurangi jumlah sampah sejak dari sumbernya dengan cara membatasi penggunaan barang yang berpotensi menjadi limbah. Indikator:

- a. Mengurangi penggunaan barang sekali pakai
- b. Mengurangi konsumsi produk berkemasan
- c. Perilaku hemat dan ramah lingkungan

2. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

Reuse adalah upaya menggunakan kembali barang yang masih layak pakai tanpa melalui proses pengolahan. Indikator:

- a. Penggunaan ulang wadah atau barang bekas
- b. Pemanfaatan kembali bahan rumah tangga
- c. Kebiasaan tidak langsung membuang barang

3. *Recycle* (Mendaur Ulang)

Recycle merupakan kegiatan mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna. Indikator:

- a. Pemilahan sampah organik dan anorganik
- b. Pengolahan sampah menjadi kompos atau produk lain
- c. Kegiatan daur ulang di tingkat rumah tangga atau komunitas

Teori 3R sangat tepat digunakan dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang ditemukan di Desa Sumanggi. Fenomena seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan membakar sampah menunjukkan bahwa prinsip *reduce* dan *reuse* belum diterapkan secara optimal. Selain itu, tidak adanya sistem pengangkutan sampah yang berjalan serta tidak optimalnya pemanfaatan sarana menunjukkan bahwa aspek *recycle* dan pengelolaan lanjutan juga belum berjalan dengan baik. Teori 3R memungkinkan peneliti untuk menganalisis pengelolaan sampah tidak hanya dari aspek kebijakan, tetapi juga dari perilaku masyarakat sebagai aktor utama. Hal ini sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam. Selain itu, teori ini juga relevan dengan pendekatan *innovative governance* yang kamu gunakan, karena menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, penggunaan teori 3R dalam penelitian ini mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji pengelolaan sampah di tingkat desa.

C. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan tidak lagi memiliki nilai guna secara langsung bagi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai residu

dari aktivitas sehari-hari manusia maupun proses alam yang harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, industri, pasar, dan aktivitas sosial lainnya yang terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penduduk. Menurut Permendagri Nomor 33 Tahun 2020, sampah dibedakan menjadi sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang memerlukan penanganan khusus dalam pengelolaannya. Secara konseptual, sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem konsumsi yang berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian lingkungan.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam menangani sampah sejak dari sumber hingga ke tahap akhir. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara terpadu. Menurut Kahfi (2017), pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pembuangan, tetapi juga mencakup proses pengendalian timbulan sampah, pemanfaatan kembali, serta pengolahan yang ramah lingkungan. Dalam perspektif yang lebih luas, Azmin et al. (2022) menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat memberikan manfaat yang

berkelanjutan. Pengelolaan yang baik dapat mengurangi dampak pencemaran serta meningkatkan nilai ekonomi dari sampah itu sendiri. Dengan demikian, pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi.

c. Tahapan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terintegrasi. Menurut Mahyudin (2017), tahapan tersebut meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah. Tahap pengumpulan merupakan proses awal yang dilakukan dari sumber sampah menuju tempat penampungan sementara dengan menggunakan berbagai sarana seperti tong sampah atau bak penampungan. Selanjutnya, tahap pengangkutan dilakukan untuk memindahkan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Tahap pengolahan meliputi kegiatan seperti pemilahan, daur ulang, dan pengomposan yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah. Sementara itu, tahap pembuangan akhir dilakukan sebagai langkah terakhir untuk menangani residu yang tidak dapat diolah kembali. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan sistem pengelolaan sampah.

2. Konsep Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*) dalam Pengelolaan Sampah

a. Pengertian *Governance*

Governance atau tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang merujuk pada proses pengelolaan urusan publik yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Konsep ini tidak hanya menekankan pada peran pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga pada pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Sururi (2018), *governance* mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks administrasi publik, *governance* dipandang sebagai pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui keterlibatan berbagai pihak. Pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik membutuhkan tata kelola yang baik agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *governance* menjadi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Konsep *Innovative Governance*

Innovative governance merupakan pengembangan dari konsep *governance* yang menekankan pada pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi tersebut dapat berupa kebijakan baru, metode pelayanan yang lebih efektif, maupun penggunaan teknologi dalam pengelolaan pelayanan publik. Menurut Sururi (2018), *innovative governance* bertujuan untuk meningkatkan

kinerja pemerintah dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang semakin kompleks. Dalam pengelolaan sampah, inovasi dapat diwujudkan melalui program-program kreatif seperti pengelolaan berbasis masyarakat, bank sampah, maupun sistem pengangkutan yang lebih efisien. Wafa dan Angin (2024) menunjukkan bahwa kebijakan inovatif seperti program Banyuwangi Hijau mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan solusi yang adaptif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan *innovative governance* menjadi relevan dalam menjawab permasalahan pengelolaan sampah di tingkat lokal.

c. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah karena merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran tersebut meliputi penyusunan kebijakan lokal, penyediaan sarana dan prasarana, serta penggerakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut Emilson et al. (2023), pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui regulasi desa yang mendorong keterlibatan masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga berfungsi sebagai fasilitator dalam menghubungkan berbagai pihak, seperti masyarakat dan instansi terkait dalam pengelolaan sampah. Nasihin et al. (2023) menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa, seperti BPD, sangat

penting dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang terstruktur. Namun, dalam praktiknya, peran pemerintah desa seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sistem operasional yang berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola di tingkat desa agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan segala fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses penanganan sampah secara efektif dan efisien. Sarana merujuk pada alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti tempat sampah, gerobak, dan kendaraan pengangkut. Sementara itu, prasarana mencakup fasilitas pendukung seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut Hajji et al. (2024), keberadaan sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, proses pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab penting pemerintah dalam mendukung pelayanan publik di bidang lingkungan.

b. Fungsi dan Peran Sarana dalam Pengelolaan Sampah

Sarana dan prasarana memiliki fungsi utama sebagai penunjang dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir. Keberadaan fasilitas seperti TPS dan kendaraan pengangkut memungkinkan sampah dapat dikelola secara sistematis dan tidak menumpuk di lingkungan masyarakat. Menurut Mahyudin (2017), sarana yang memadai akan memperlancar proses pengelolaan sampah serta meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, sarana juga berperan dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Namun, efektivitas sarana sangat bergantung pada sistem operasional yang berjalan serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkannya. Dengan demikian, sarana tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan yang harus dikelola secara berkelanjutan.

c. Permasalahan Sarana dan Prasarana di Tingkat Desa

Meskipun sarana dan prasarana telah tersedia, dalam praktiknya sering ditemukan berbagai permasalahan dalam pemanfaatannya, terutama di tingkat desa. Salah satu permasalahan utama adalah tidak optimalnya penggunaan fasilitas yang telah disediakan, baik karena kurangnya pengelolaan maupun minimnya kesadaran masyarakat. Menurut Hakikiah (2024), keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Selain itu, tidak adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap operasional

pengelolaan sampah juga menyebabkan fasilitas tidak digunakan secara maksimal. Kondisi ini seringkali mengakibatkan penumpukan sampah dan munculnya tempat pembuangan liar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak hanya berfokus pada penyediaan, tetapi juga pada pemanfaatan dan pengawasan secara berkelanjutan.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Sampah

a. Faktor Pendukung Pengelolaan Sampah

Faktor pendukung merupakan segala aspek yang dapat memperlancar dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah. Salah satu faktor utama adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti tempat penampungan, kendaraan pengangkut, dan fasilitas pengolahan sampah. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan. Menurut Wafa dan Angin (2024), keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh adanya regulasi yang jelas serta dukungan anggaran yang memadai. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah, terutama dalam hal pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan ketersediaan fasilitas menjadi elemen penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah

Di sisi lain, pengelolaan sampah juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, yang tercermin dari kebiasaan membuang sampah sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Nasihin et al. (2023), kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, seperti tidak adanya petugas pengangkutan sampah, juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat lokal. Permasalahan lain yang sering muncul adalah tidak optimalnya pemanfaatan sarana yang telah disediakan, sehingga fasilitas yang ada tidak berfungsi secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dan munculnya tempat pembuangan liar yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

c. Implikasi Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Penelitian

Identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah menjadi hal yang penting untuk memahami kondisi nyata di lapangan secara komprehensif. Analisis terhadap kedua faktor tersebut dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas sistem pengelolaan sampah yang telah berjalan. Menurut Emilson et al. (2023), pemahaman terhadap faktor-faktor ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang

lebih tepat sasaran. Dalam konteks penelitian ini, faktor pendukung dan penghambat akan dianalisis untuk mengetahui permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi. Hal ini juga berkaitan dengan upaya untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di tingkat desa. Dengan demikian, kajian terhadap faktor-faktor tersebut menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan penelitian secara menyeluruh.

D. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Peraturan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 guna memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Regulasi ini menekankan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama. Selain itu, tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah .

Secara substansi, Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan sampah, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Asas dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam Perda ini didasarkan pada beberapa asas utama:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas kesadaran
- d. Asas kebersamaan
- e. Asas keselamatan dan keamanan
- f. Asas nilai ekonomi

Adapun tujuan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat
- b. Menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi
- c. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah
- d. Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat

2. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah, meliputi:

- a. Menyusun kebijakan dan standar pengelolaan sampah
- b. Menyediakan sarana dan prasarana (TPS, TPA, dll)
- c. Melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat
- e. Melakukan koordinasi lintas sektor

Selain itu, tanggung jawab juga dibebankan secara berjenjang:

- a. Pemerintah daerah → penyelenggara utama
- b. Camat, lurah, kepala desa → pembinaan masyarakat

3. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam Perda ini terdiri dari dua aspek utama:

- a. Pengurangan sampah, meliputi:
 - 1) Pembatasan timbulan sampah
 - 2) Daur ulang
 - 3) Pemanfaatan Kembali
- b. Penanganan sampah, meliputi:
 - 1) Pemilahan
 - 2) Pengumpulan
 - 3) Pengangkutan
 - 4) Pengolahan
 - 5) Pemrosesan akhir

Sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari sumber hingga ke TPA.

4. Pembagian Tanggung Jawab Pengangkutan Sampah

Regulasi ini menegaskan pembagian tanggung jawab:

- a. Masyarakat → membawa sampah dari rumah ke TPS
- b. Pemerintah daerah → mengangkut dari TPS ke TPA

5. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat memiliki hak:

- a. Mendapat pelayanan pengelolaan sampah
- b. Mendapat informasi dan pembinaan
- c. Mendapat kompensasi jika terdampak

Namun juga memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan tempat sampah
- b. Membuang sampah ke TPS
- c. Mengelola sampah secara ramah lingkungan

6. Peran serta Masyarakat

Masyarakat didorong untuk aktif dalam:

- a. Pengelolaan sampah di tingkat RT/RW
- b. Memberikan saran dan masukan kebijakan
- c. Membentuk kader pengelolaan sampah
- d. Melakukan pemilahan dan pengumpulan

7. Larangan dalam Pengelolaan Sampah

Perda ini secara tegas melarang:

- a. Membuang sampah sembarangan (termasuk ke sungai)
- b. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya
- c. Pengelolaan yang mencemari lingkungan
- d. Merusak fasilitas umum dan pertamanan

8. Insentif dan Disinsentif

Pemerintah dapat:

- a. Memberikan insentif (penghargaan, subsidi, kemudahan izin)
- b. Memberikan disinsentif (denda, penghentian subsidi)

Tujuannya:

- a. Mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha
- b. Sanksi Administratif dan Pidana

Perda ini juga mengatur Sanksi administratif: pencabutan izin, denda. Lalu Sanksi pidana:

- a. Kurungan hingga 3 bulan
- b. Denda hingga Rp50.000.000

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari landasan normatif berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, dan diakomodir oleh regulasi turunan dari Pemerintah Daerah berupa Perda Kab. Hulu Sungai Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Implementasi kebijakan tersebut kemudian dilihat dalam konteks lokal, yaitu di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara. Dalam menganalisis

pengelolaan sampah di lokasi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan teori 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai kerangka konseptual utama. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana perilaku masyarakat dalam mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah sebagai bagian dari sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori 3R berfungsi sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip pengelolaan sampah telah diterapkan di tingkat desa.

Selanjutnya, kerangka berpikir ini juga mengintegrasikan fenomena empiris yang terjadi di lapangan, seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan membakar sampah, tidak optimalnya pemanfaatan sarana yang telah tersedia, serta tidak adanya petugas pengangkutan sampah. Fenomena tersebut dianalisis bersama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah, yang meliputi peran pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi masyarakat. Hubungan antara teori, fenomena, dan faktor-faktor tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan analisis komprehensif mengenai pengelolaan sampah di Desa Sumanggi. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan utama sekaligus memberikan gambaran mengenai upaya perbaikan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya permasalahan nyata terkait pengelolaan sampah, seperti kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai dan membakar sampah, tidak optimalnya pemanfaatan sarana yang telah disediakan, serta tidak adanya petugas pengangkutan sampah. Selain itu, desa ini juga telah memiliki beberapa fasilitas pendukung pengelolaan sampah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dipilih karena dianggap mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai permasalahan pengelolaan sampah di tingkat desa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan perilaku masyarakat, peran pemerintah, serta kondisi sosial yang melingkupinya. Menurut Creswell (2021), penelitian kualitatif

digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa kata-kata, tindakan, serta hasil observasi yang dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai kondisi pengelolaan sampah di Desa Sumanggi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi lebih pada upaya memahami dan menjelaskan kondisi nyata berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2022), penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan situasi atau fenomena tertentu secara mendalam. Dalam konteks penelitian ini, tipe penelitian digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan sampah dilaksanakan di Desa Sumanggi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi pengelolaan sampah di lokasi penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 3.1

Data Informan

No	Kategori Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Sumanggi	1 orang
2	Sekretaris Desa / Kaur Umum	1 orang
3	Ketua BPD	1 orang
4	Petugas Kebersihan Desa	2 orang
5	Tokoh Masyarakat	2 orang
6	Masyarakat Umum (RT/RW)	4 orang
Total		11 orang

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari unsur pemerintah desa, petugas kebersihan, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Rincian informan dapat dilihat pada tabel di atas. Informan tersebut dipilih karena memiliki peran dan pengalaman yang berbeda dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain yang telah tersedia, seperti dokumen, laporan, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat dan melengkapi data primer dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dokumen resmi pemerintah desa, laporan dari Dinas Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait pengelolaan sampah seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2020.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengelolaan sampah. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan adanya data sekunder, peneliti dapat melakukan triangulasi data sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan penjabaran konsep teoritis ke dalam bentuk variabel, sub variabel, dan indikator yang dapat diukur atau diamati di lapangan. Menurut Sugiyono (2022), desain operasional bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, desain operasional disusun berdasarkan teori pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) serta dikombinasikan dengan aspek tata kelola pemerintahan (*governance*) dan partisipasi masyarakat.

Variabel utama dalam penelitian ini adalah pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa sub variabel yang mencerminkan aspek perilaku masyarakat, peran pemerintah, serta dukungan sarana dan prasarana. Indikator disusun berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai, tidak optimalnya sarana, serta tidak adanya petugas pengangkutan sampah. Dengan demikian, desain operasional ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menggali data secara sistematis dan komprehensif.

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengelolaan Sampah	<i>Reduce</i> (Pengurangan Sampah)	a. Kebiasaan mengurangi penggunaan barang sekali pakai b. Kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah c. Perilaku konsumsi ramah lingkungan
	<i>Reuse</i> (Penggunaan Kembali)	a. Pemanfaatan kembali barang bekas.

Variabel	Sub Variabel	Indikator
		b. Kebiasaan tidak langsung membuang barang c. Penggunaan ulang wadah/kemasan
	<i>Recycle</i> (Daur Ulang)	a. Pemilahan sampah organik dan anorganik b. Pengolahan sampah (kompos/daur ulang) c. Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
	Peran Pemerintah Desa	a. Penyediaan sarana dan prasarana b. Kebijakan/program pengelolaan sampah c. Ketersediaan petugas pengangkutan sampah
	Sarana dan Prasarana	a. Ketersediaan TPS/TPST/bak sampah b. Ketersediaan kendaraan pengangkut (viar) c. Pemanfaatan sarana yang tersedia
	Partisipasi Masyarakat	a. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah b. Kepatuhan membuang sampah pada tempatnya c. Kesadaran menjaga kebersihan lingkungan

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang komprehensif serta mendukung validitas melalui triangulasi data. Menurut Sugiyono (2022), penggunaan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Desa Sumanggi, seperti keberadaan sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, serta perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Observasi juga digunakan untuk mengidentifikasi fenomena seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai, pembakaran sampah, serta pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Menurut Creswell (2021), observasi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial secara nyata. Dengan demikian, observasi menjadi penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang telah ditentukan, seperti kepala desa, perangkat desa, petugas kebersihan, dan masyarakat. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait pengelolaan sampah, peran pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Menurut Sugiyono (2022), wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan terbuka sehingga memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam. Dengan teknik ini, peneliti dapat

memahami persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh informan dalam pengelolaan sampah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi data berupa foto kondisi lingkungan, sarana prasarana, serta dokumen resmi seperti peraturan desa, laporan kegiatan, dan data dari instansi terkait. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan keabsahan data. Dengan demikian, dokumentasi membantu peneliti dalam memperoleh bukti nyata terkait kondisi pengelolaan sampah di lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan berlangsung secara interaktif.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti data mengenai perilaku masyarakat, peran pemerintah, dan kondisi sarana prasarana. Data yang tidak relevan akan disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah. Proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti dalam menyederhanakan data tanpa menghilangkan makna penting yang terkandung di dalamnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses menyusun data dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan matriks yang menggambarkan kondisi pengelolaan sampah di Desa Sumanggi. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan dari data yang diperoleh. Menurut Miles et al. (2014), penyajian data yang baik akan membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, penyajian data menjadi langkah penting dalam proses analisis data kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan cara merumuskan temuan penelitian berdasarkan

data yang telah dianalisis. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat final, melainkan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (triangulasi) untuk memastikan keabsahan data. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kredibilitas data berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Menurut Sugiyono (2022), uji kredibilitas data dapat dilakukan melalui beberapa teknik, seperti triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, serta *member check*. Dalam penelitian ini, teknik uji kredibilitas data dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan tersebut agar data yang diperoleh benar-benar valid dan akurat.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan

informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti kepala desa, perangkat desa, petugas kebersihan, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi. Dengan demikian, triangulasi membantu meningkatkan keakuratan dan kepercayaan terhadap data yang diperoleh.

2. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara memperpanjang waktu penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara berulang terhadap kondisi pengelolaan sampah di Desa Sumanggi. Hal ini bertujuan untuk memahami situasi secara lebih komprehensif serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penafsiran data. Menurut Sugiyono (2022), perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data karena peneliti memiliki kesempatan untuk mengecek kembali kebenaran informasi yang diperoleh. Dengan demikian, teknik ini membantu peneliti dalam memperoleh data yang lebih valid.

3. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara mengamati secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara detail terhadap perilaku masyarakat, kondisi sarana prasarana, serta pelaksanaan

pengelolaan sampah di lapangan. Ketekunan dalam pengamatan memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan hubungan yang lebih jelas dari data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2022), peningkatan ketekunan dapat membantu peneliti dalam memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan konsisten. Oleh karena itu, teknik ini menjadi penting dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian.

4. *Member Check*

Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data atau informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada informan mengenai hasil wawancara atau interpretasi data yang telah diperoleh. Tujuan dari *member check* adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Menurut Creswell (2021), *member check* merupakan salah satu teknik yang efektif untuk meningkatkan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian dapat lebih dipercaya karena telah diverifikasi langsung oleh sumber data.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmin, N., Irfan, I., Nasir, M., Hartati, H., & Nurbayan, S. (2022). Pelatihan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik di Desa Woko Kabupaten Dompu. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 195–199. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v1i3.266>
- Emilson, N. H., Okpirianty, R., Kasra, H., Ardha, D. J., Herudiansyah, G., Rani, F. H., & Qosim, S. (2023). Kebijakan pengelolaan sampah bernilai ekonomi di Desa Tanjung Atap Barat Ogan Ilir. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 11(1). <https://doi.org/10.18196/berdikari.v11i1.15069>
- Hajji, A., Rizal, M., Sugandi, M., & Ariestadi, D. (2024). Perancangan bangunan instalasi pengolahan sampah terpadu (TPST) kawasan wisata Pantai Gemah Tulungagung. *Jurnal Karinov*, 7(1), 8–14.
- Hakikiah, N. N. (2024). Bank sampah sebagai strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 5(2), 45–56.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 3(1), 66–74.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan kapasitas anggota badan permusyawaratan desa dalam teknik penyusunan peraturan desa pengelolaan sampah rumah tangga. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 178–183.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Sandika, I. K. B., Ariasih, N. K., Sutarwiyasa, I. K., Lesmana, P. S. W., Ginantra, N. L. W. S. R., Widiartha, K. K., Indrawan, I. G. A. (2022). PKM optimalisasi pengelolaan sampah melalui pemilahan pada sumber timbulannya di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi*, 1(4), 88–96.
- Sururi, A. (2018). Collaborative governance sebagai inovasi kebijakan strategis. *Humanika*, 25(1), 24–37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi kebijakan program Banyuwangi Hijau dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 1–14.

Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ristya, W. (2020). Pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(2), 120–130.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.